



BUPATI KONAWE SELATAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan adalah dengan ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 - 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

SN

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe selatan Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 7)

52

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013 - 2015**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah;
8. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.


BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 - 2015 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5

1. Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bagian Pemerintahan.
2. Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 2013

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 2013

Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan



H. SARDJUN MOKKE

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013 NOMOR.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 33

TAHUN : 2013

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN 2013-2015

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Target			SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BAIK							
1.	Kebijakan meningkatkan sistem administrasi pemerintah desa/ kelurahan yang akuntabel	Presentase pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	70%	80%	100%	BPM dan Pemdes
		Presentase kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	70%	80%	100%	BPM dan Pemdes
		Presentase desa yang mampu menyusun APBD		245 Desa	260 Desa	310 Desa	BPM dan Pemdes
2.	Kebijakan Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan terpadu	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	14 izin yang memiliki SOP	17 izin yang memiliki SOP	20 izin yang memiliki SOP	Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
		Presentase Pelayanan yang dilaksanakan transparan, tepat waktu dan akuntabel	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	80%	75%	100%	Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
		Jumlah SKPD yang melaksanakan pelayanan secara on line		1 SKPD	2 SKPD		Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
3.	Kebijakan Meningkatkan Kompetensi Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya	Program Pendidikan kedisiplinan	50%	75%	85%	SKPD
		Presentase unit kerja yang memiliki aparatur kompeten sesuai kualifikasi dan kebutuhan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50%	75%	85%	SKPD
		Presentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir yang tepat waktu (SIMPEG)	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	50%	75%	85%	SKPD
		Presentase SKPD yang memiliki SUFK sesuai tugas pokok dan fungsinya	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	50%	75%	85%	Bagian Organisasi dan Sumber SKPD
		Presentase unit kerja yang memiliki analisis jabatan, ABK dan Standar Kompetensi		50%	75%	85%	
		Presentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya		50%	75%	85%	

9

Kebijaksanaan meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan

Program pengembangan data dan informasi

4		Jumlah rapat koordinasi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan setiap tahun	Program Kerjasama pembangunan	3 kali	4 kali	4 kali	Keuangan
		Presentase perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dalam setiap tahun	Program Kerjasama pembangunan	75%	85%	100%	Keuangan
		Jumlah rumusan kebijakan dan kajian perencanaan ekonomi, sosial, dan politik yang disusun setiap tahun	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	2 KEBIJAKAN dan KAJIAN	2 KEBIJAKAN dan KAJIAN	100%	Keuangan
		Jumlah dokumen peraturan yang berkaitan dengan administrasi pembangunan daerah yang disusun setiap tahun	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	Keuangan
		Kelengkapan/akurasi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Program perencanaan pengembangan kota - kota menengah dan besar Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Nilai	50%	100%	Keuangan
				50%	100%	100%	Keuangan
			Program perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	Keuangan
			Program perencanaan pengembangan ekonomi	9 AKSI/TOPIK BID. EKONOMI	12 AKSI/TOPIK BID. EKONOMI	100% AKSI/TOPIK BID. EKONOMI	Keuangan
			Program perencanaan sosial budaya	60%	70%	100,00%	Keuangan
			Program perencanaan lingkungan	60%	75%	100,00%	Keuangan
			Program Pengembangan Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Keuangan
			Program Perencanaan Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Keuangan
		Kejelasan/kepastian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Program pengembangan wilayah perbatasan	75%	85%	100%	Kantor Smpk Daerah
		Presentase kelengkapan arsip dan dokumen daerah	Program pengembangan informasi dan komunikasi daerah	100%	75%	100%	Keuangan
			Program pengembangan dan kelengkapan dokumentasi/arsip daerah	100%	100%	100%	Keuangan
			Program pemeliharaan arsip/berkas surat/persurutan kelengkapan	50%	75%	85%	Keuangan

27

		Presentase kinerja KPA, KPA/DAK dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara jujur dan tepat waktu	Program pengadministrasian, pengembangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	50%	75%	90%	Bagian Pemerintahan Umum
		Presentase kinerja yang menunjukkan KPA/DAK dan laporan penyelenggaraan kinerja secara benar dan tepat waktu		100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan Umum
		Presentase kelengkapan data dan administrasi yang akurat dan tepat waktu	Program pengembangan administrasi pengelolaan SPA	100%	100%	100%	Bagian SPA
		Presentase kelengkapan data dan administrasi perekonomian yang akurat dan tepat waktu	Program pengembangan administrasi perekonomian daerah	50%	75%	90%	Bagian Ekonomi
		Presentase ketepatan operasional Bupati dan Wakil Bupati	Program peningkatan pelayanan kehumasan kepala daerah/wakil kepala daerah	50%	75%	90%	Kepala Umum dan Protokol
		Presentase administrasi pelayanan umum yang akurat dan tepat waktu	Program peningkatan administrasi pelayanan umum	50%	75%	90%	Bagian Umum dan Protokol
		Presentase kelengkapan data dan administrasi pengelolaan keuangan sekretariat yang akurat dan tepat waktu	Program peningkatan administrasi pengelolaan keuangan sekretariat daerah	50%	75%	90%	Bagian Keuangan
		Presentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akurat dan tepat waktu	Program Pelayanan administrasi perkantoran	50%	75%	90%	Bagian Umum
		Presentase penurunan pelanggaran perda	Program pemeliharaan kantrantomas dan pencegahan tindak kriminal	50%	75%	90%	Satpol PP
		Presentase barang beredar dan jasa sesuai ketentuan	Program pengawasan pelaksanaan perda	50%	75%	90%	Satpol PP
Kebijakan Mewujudkan Kepastian Hukum		Presentase terpeliharanya Kamtibmas	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	50%	75%	90%	Kesbang dan Linmas
		Kondusifnya kehidupan politik dan berdemokrasi masyarakat		50%	75%	90%	Kesbang dan Linmas
			Program pengembangan wawasan kebangsaan	50%	75%	90%	Kesbang dan Linmas
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	50%	75%	90%	Kesbang dan Linmas
			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	50%	75%	90%	Kesbang dan Linmas
			Program pendidikan politik masyarakat	50%	75%	90%	Kesbang dan Linmas
			Program upaya pencegahan dan penanggulangan Narkoba	50%	75%	90%	Badan Narkotika Kabupaten
		Presentase kecamatan yang bebas penyelenggaraan IVAKZA		50%	75%	90%	

Presentase penyuluhan kepada petani/kelompok tani tentang cara-cara pemeliharaan dan anak dan beternak	Program Penguatan Ketahanan Pangan Peningkatan kemampuan petani	50%	75%	90%	Badan Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan masyarakat	50%	75%	90%	Badan Pemberdayaan Peternak dan KB
Presentase pemeliharaan dan tenaga kerja yang mempunyai IPIK Ketangkerjaan	Program Perlindungan dan pengembangan tenaga ketangkerjaan	50%	75%	90%	Badan Ketangkerjaan
Presentase penyuluhan keas ketangkerjaan dan hubungan industrial		50%	75%	90%	Disas Ketangkerjaan
Presentase ketataan usaha di bidang kepariwisataan	Program pengembangan Destinasi pariwisata	50%	75%	90%	Disas Budaya
Presentase PNS dan perangkat desa yang mendapatkan bantuan hukum		50%	75%	90%	Disas Hukum
Presentase akurasi informasi pemerintah yang beredar di masyarakat	Program kerjasama informasi dengan Mass Media	50%	75%	90%	Bagian Humas
Terbentuknya citra positif pemerintah di mata masyarakat		50%	75%	90%	Bagian Humas
Jumlah tempat peribadatan dan organisasi keagamaan yang mendapatkan pembinaan	Program peningkatan dan pengembangan keagamaan	50 tempat ibadah	75 tempat ibadah	90 tempat ibadah	Badan Keas
Presentase keamanan dan kelancaran masyarakat dalam menjalankan syariat agama dan kepercayaannya		50%	75%	90%	Badan Keas
Presentase PIA yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah	Program Penguatan Ketahanan Pangan	50%	75%	90%	Badan Ketahanan Pangan
Presentase rumah ibadah yang terdistribusi secara merata dan tepat	Program peningkatan dan pengembangan rumah ibadah	50%	75%	100%	Badan Peningkatan Agama
Presentase desa/kelurahan yang memiliki akses pelayanan publik dan keagamaan		50%	75%	100%	Badan Ketahanan Pangan
Presentase penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan	Program pengendalian pelanggaran lalu lintas	50%	75%	90%	Disas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Presentase bantuan pembayaran pajak dan retribusi	Program pembinaan dan fasilitasi penerimaan keuangan daerah	50%	75%	90%	Disas Keuangan
Presentase kecamatan yang bebas penambangan liar	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	50%	75%	90%	Disas Lingkungan

51

Presentase ketenagiatan yang bebas ilegal logging	Program Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	50%	75%	85%	Dinas Ketenagahan
Presentase barang beredar dan jasa sesuai ketentuan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	50%	75%	85%	Perindag
Presentase kecamatan yang bebas ilegal fising	program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut	50%	75%	85%	Kelautan dan Perikanan
Jumlah rancangan produk hukum daerah yang diperdakan secara tepat waktu sesuai kebutuhan daerah	Program penataan peraturan perundang-undangan	50%	75%	85%	Bagian Hukum

II. MENINGKATNYA KUALITAS SDM

1.	Kebijakan mewujudkan seluruh desa menjadi desa siaga	Presentase desa yang memiliki POSKESDES	Program upaya kesehatan masyarakat	50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
		Presentase desa yang memiliki bidan dan kader		50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
		Presentase desa siaga aktif (UKBM)		50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
		Presentase sentra produksi yang memenuhi standar kesehatan		50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
2.	Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringan memenuhi Standar	Presentase puskesmas yang memenuhi standar mutu	Program obat dan pembekalan Kesehatan	50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
		Presentase kunjungan ibu hamil dengan K4	Program Pengawasan obat dan makanan	50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
		Presentase ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
		Presentase persalinan yang di tolong tenaga kesehatan	Program pencegahan dan penanganan penyakit menular	50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
		Presentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan	Program standarnisasi pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Presentase neonatal dengan komplikasi yang ditangani	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
		Presentase bayi yang memperoleh pelayanan	Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana PUSKESMAS/PUSTU dan jaringannya	50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
		Presentase desa UCI	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
		Presentase balita dan anak pra sekolah yang dilayani	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita	50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
		Presentase balita gakin yang mendapatkan MP ASI	Program Peningkatan pelayanan kesehatan LANSIA	50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
		Presentase siswa SD yang diperiksa kesehatanya	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
		Presentase PUS yang menjadi peserta KB aktif	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
		Jumlah penemuan dan penanganan penyakit menular		50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
		Presentase cakupan rawat jalan bagi gakin	Program akreditasi dan perizinan pelayanan kesehatan	50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
		Presentase cakupan rawat inap bagi gakin		50%	75%	85%	Dinas Kesehatan

	Presentase Sarana Kesehatan yang memiliki kemampuan		50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
	Presentase desa KLB yang dilakukan penyelidikan		50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
	Peringkat akreditasi yang diperoleh	Program standarnisasi pelayanan RSUD	50%	75%	85%	RSUD
	Indeks Pelayanan yang dicapai RSUD	Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana RSUD	50%	75%	85%	RSUD
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD	50%	75%	85%	RSUD
Kebijakan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	APK dan APM di setiap Kecamatan	Program pendidikan anak usia dini	50%	75%	85%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Presentase anak usia sekolah lulus SD, SLTP dan SLTA	Program wajib belajar pendidikan dasar 12 Tahun	50%	75%	85%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Presentase anak putus sekolah yang menyelesaikan kejar paket A,B dan C	Program Pendidikan menengah	50%	75%	85%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Rasio Ketersediaan ruang kelas untuk SD,SLTP dan SLTA	Program Pendidikan Luar Biasa	50%	75%	85%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Presentase guru yang memenuhi kualifikasi, sertifikasi dan standar kompetensi	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan	50%	75%	85%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Presentase sekolah yang menerapkan kurikulum pertanian, IT dan kewirausahaan	Program Manajemen pelayanan pendidikan	50%	75%	85%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Presentase sekolah yang memenuhi standar mutu		50%	75%	85%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Peningkatan kelulusan SD,SLTP dan SLTA		50%	75%	85%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Presentase pendidikan non formal yang memenuhi standar mutu		50%	75%	85%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Presentase desa yang memperoleh layanan perpustakaan	Program Pengembangan budaya baca dan pengembangan perpustakaan	50%	75%	85%	Perpustakaan daerah
	Ragam dan jumlah buku perpustakaan sesuai potensi desa		50%	75%	85%	Perpustakaan daerah
	Jumlah Pustakawan dan pustaka		50%	75%	85%	Perpustakaan daerah
4. Kebijakan Mewujudkan Keluarga Berperilaku Hidup Bersih Sehat dan KB	Presentase gizi kurang pada balita	Program pengembangan lingkungan sehat	50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
	Presentase Bumil KKK	Program perbaikan gizi masyarakat	50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
	Presentase Bumil/ Rufas Anemia		50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
	Presentase keluarga sadar diri		50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
	Presentase penyandu aktif		50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
	Presentase rumah tangga ber PHBS		50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
	Presentase institusi pendidikan ber PHBS		50%	75%	85%	Dinas Kesehatan

5

		Presentase kawasan permukiman, fasam dan fasos yang memenuhi standar kesehatan		50%	75%	85%	Dinas Kesehatan
		Jumlah desa wisata aktif di setiap desa	Program keluarga berencana (KB)	50%	75%	85%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Presentase keluarga ikut KB	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	50%	75%	85%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Presentase siswa TK/SD/MI di desa tertinggal yang mendapatkan makanan tambahan (PMT-AS)	Program kesehatan reproduksi remaja	50%	75%	85%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Presentase kecamatan yang memiliki PIKRR	Program pelayanan kontrasepsi	50%	75%	85%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	50%	75%	85%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
			Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi	50%	75%	85%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
			Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	50%	75%	85%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
			Program pengembangan model operasional BKB - Posyandu PADU	50%	75%	85%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
5.	Kebijakan Peningkatan Tenaga Kerja Produktif dan Bebas Aksara,	Presentase pengangguran yang menjadi pekerja profesional atau wirausahaan	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	50%	75%	85%	Dinas Nakertrans
		Jumlah dan jenis pelatihan di setiap kecamatan	Program peningkatan kesempatan kerja	50%	75%	85%	Dinas Nakertrans
		Jumlah wirausaha baru bidang UKM di setiap kecamatan	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif	50%	75%	85%	Dinas Koperasi dan UKM
		Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan di setiap kecamatan	Program pengembangan kewirausahaan kehutanan	50%	75%	85%	Dinas Kehutanan
		Jumlah wirausaha baru di bidang agribisnis di setiap kecamatan	Program peningkatan kesejahteraan petani	50%	75%	85%	BP4K
			Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	50%	75%	85%	SP4K
		Jumlah wirausahaan baru di bidang kelautan dan perikanan	Program pemberdayaan ekonomi pesisir	50%	75%	85%	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	50%	75%	85%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah wirausahaan baru di bidang kebudayaan dan pariwisata	Program pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	50%	75%	85%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SM

		Jumlah wirausaha baru lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	50%	75%	85%	BPM dan Pemdes
		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kesetaraan gender		50%	75%	85%	BPM dan Pemdes
			Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	50%	75%	85%	BPM dan Pemdes
			Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	50%	75%	85%	BPM dan Pemdes
		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kesetaraan gender	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	50%	75%	85%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Jumlah perempuan wirausahaan baru	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalm pembangunan	50%	75%	85%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Jumlah orang cacat/penyandang masalah sosial yang menjadi tenaga kerja produktif	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	50%	75%	85%	Dinas Sosial
		Jumlah buta aksara	Program pendidikan non formal;	50%	75%	85%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
6	Kebijakan meningkatkan prestasi pemuda pemudi Konawe Selatan	Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya dan imtaq berskala regional dan internasional di Konawe Selatan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	50%	75%	85%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah prestasi regional dan internasional yang diraih	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	50%	75%	85%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana kepemudaan & olahraga	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	50%	75%	85%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	50%	75%	85%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	50%	75%	85%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-budaya dan sanggar seni	Program pengelolaan keragaman budaya	50%	75%	85%	Dinas kebudayaan dan pariwisata
		Jumlah seni-budaya Konawe Selatan yang tampil di forum nasional dan internasional		50%	75%	85%	Dinas kebudayaan dan pariwisata
III. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR WILAYAH							
1	Kebijakan peningkatan infrastruktur pemukiman	Persentase desa yang memiliki jalan dan jembatan, air bersih, sanitasi, drainase dan fasum-fasos	Program Pembangunan infrastruktur pedesaan	50%	75%	85%	Dinas PU
			Program pengembangan perumahan	50%	75%	85%	Dinas PU
			Program pengendalian banjir	50%	75%	85%	Dinas PU
		Persentase desa yang memiliki sarana listnk dan energi yang cukup	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	50%	75%	85%	Dinas Pertambangan

52

		Persentase kawasan dan eks kawasan transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan	Program pengembangan wilayah transmigrasi	50%	75%	85%	Nakertrans
		Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi untuk RTM	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	50%	75%	85%	Dinas Sosial
		Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur pedesaan	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	50%	75%	85%	BPMD & Pemdes
2.	Kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pada seluruh sentra produksi	Persentase sentra produksi non perikanan yang memiliki jalan dan jembatan air bersih sanitasi dan drainase yang handal	Program pembangunan jalan dan jembatan	50%	75%	85%	Dinas PU
		Jumlah pemantaatan air/sungai bawah tanah (sumur pompa)	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	50%	75%	85%	Dinas PU
			Program pembangunan turap/talud/bronjong	50%	75%	85%	Dinas PU
			Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	50%	75%	85%	Dinas PU
			Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	50%	75%	85%	Dinas PU
			Program pembangunan sistem informasi / database jalan dan jembatan	50%	75%	85%	Dinas PU
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	50%	75%	85%	Dinas PU
			Program penyediaan dan pengelolaan air baku	50%	75%	85%	Dinas PU
			Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	50%	75%	85%	Dinas PU
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	50%	75%	85%	Dinas PU
			Program pengembangan kawasan agropolitan	50%	75%	85%	Dinas PU
			Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	50%	75%	85%	Dinas PU
		Persentase sentra produksi (sawah, ladang/tegalan dan pekarangan) yang memiliki jalan usaha tani dan jalan produksi	Program peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian	50%	75%	95%	Dinas Pertanian
		Persentase sawah yang memiliki jaringan irigasi tersier dan irigasi pedesaan		50%	75%	85%	Dinas Pertanian

Sm

		Jumlah penyediaan penampung air (Embung dan damparit/ tata air mikro)		50%	75%	85%	Dinas Pertanian
		Persentase sentra produksi (sawah, ladang/tegalan dan pekarangan) yang memiliki UPJA (Unit Penyewaan Jasa Alsintan) dan Alsintan lainnya		50%	75%	85%	Dinas Pertanian
		Persentase pemenuhan kebutuhan pupuk organik		50%	75%	85%	Dinas Pertanian
		jumlah RPH, TPH dan RPA yang memiliki sarana pengolahan limbah, sanitasi dan drainase		50%	75%	85%	Dinas Pertanian
		Jumlah sentra produksi pertanian yang memiliki unit pengolahan hasil,		50%	75%	85%	Dinas Pertanian
		Persentase lahan pertanian yang terairi secara kontinyu		50%	75%	85%	Dinas Pertanian
		Persentase sentra produksi perikanan yang memiliki jalan produksi saluran tambak/kolam, fasilitas pengolahan ikan, sanitasi dan drainase	Program peningkatan infrastruktur perikanan	50%	75%	85%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah PPI, UPR dan BBI		50%	75%	85%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah dan jenis sarana budidaya dan tangkap ikan		50%	75%	85%	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Kebijakan pembangunan kawasan berkesinambungan (sustainable)	Persentase ekosistem (mangrove, terumbu karang dan padanglamun) yang lestari	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut	50%	75%	85%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase kawasan perairan umum daratan (PUD) yang terpelihara ekosistemnya.		50%	75%	85%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Luas kawasan hutan yang direhabilitasi;		50%	75%	85%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase kecamatan yang memiliki rencana detail tata ruang wilayah kecamatan yang diperdakan	Program perencanaan tata ruang	50%	75%	85%	Dinas PU
		Persentase pembangunan di kecamatan sesuai RTRW	Program pemanfaatan ruang	50%	75%	85%	Dinas PU
			Program pengendalian dan pemanfaatan ruang	50%	75%	85%	Dinas PU
		Luas hutan rakyat yang direhabilitasi.		50%	75%	85%	Dinas Kehutanan
			Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	50%	75%	85%	Dinas Kehutanan
			Program rehabilitasi hutan dan lahan	50%	75%	85%	Dinas Kehutanan
		Persentase desa yang bebas pencemaran dan sampah berserakan;	Program pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup	50%	75%	85%	Badan Lingkungan Hidup
		Rasio ruang terbuka hijau;	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	50%	75%	85%	Badan Lingkungan Hidup

57

Jumlah potensi keanekaragaman hayati yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date,	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	50%	75%	85%	Badan Lingkungan Hidup
Persentase usaha yang memenuhi standar baku mutu lingkungan	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	50%	75%	85%	Badan Lingkungan Hidup
Persentase kecamatan yang bebas penambangan liar	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	50%	75%	85%	Distamben
	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak Lingkungan	50%	75%	85%	Distamben

IV. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perdesaan

1.	Kebijakan Peningkatan kelompok usaha yang mandiri di desa	Jumlah UMKM yang memperoleh permodalan dan jumlah modal yang bergulir	Program penciptaan iklim UKM yang kondusif	50%	75%	85%	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase UMKM yang mandiri	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	50%	75%	85%	Dinas Koperasi dan UKM
			Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	50%	75%	85%	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase desa yang memiliki koperasi berkualitas sehat	Program peningkatan kerjasama internasional	50%	75%	85%	Perindag
			Program peningkatan dan pengembangan ekspor	50%	75%	85%	Perindag
			Program pengembangan industri kecil dan menengah	50%	75%	85%	Perindag
		Persentase kelompok tani yang mandiri	Program pemberdayaan kelompok tani	50%	75%	85%	Pertanian
		Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan (pokdakan) yang mandiri,	Program pemberdayaan kelompok tani pembudidaya/ tangkap	50%	75%	85%	Perikanan dan Keautan
		Persentase kelompok nelayan yang mandiri		50%	75%	85%	Perikanan dan Keautan
		persentase desa Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang mandiri.		50%	75%	85%	Perikanan dan Keautan
		Persentase desa dengan Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam untuk Perempuan	Program pemberdayaan kelompok usaha ekonomi produktif perdesaan	50%	75%	85%	PMD dan Pemdes
		Persentase desa yang memiliki kelompok usaha yang mampu memajukan		50%	75%	85%	PMD dan Pemdes
		Jumlah kelompok usaha aktif dengan keanggotaan yang berbeda di setiap desa.		50%	75%	85%	PMD dan Pemdes
		Persentase lembaga distribusi pangan yang mandiri	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	50%	75%	85%	Ketahanan Pangan
		jumlah desa mandiri pangan		50%	75%	85%	Ketahanan Pangan

42

2.

	persentase sentra produksi pertanian yang memiliki lumbung pangan		50%	75%	85%	Ketahanan Pangan
	Persentase desa PUAP yang mandiri	Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	50%	75%	85%	BP4K
	Persentase kecamatan yang memiliki klinik konsultasi bisnis		50%	75%	85%	BP4K
		Program pemberdayaan petani melalui teknologi dan informasi pertanian	50%	75%	85%	BP4K
	Jumlah masyarakat PMKS yang menjadi kelompok usaha bersama produktif	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;	50%	75%	85%	Dinas Sosial
	Persentase PMKS yang memperoleh pembinaan		50%	75%	85%	Dinas Sosial
		Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;	50%	75%	85%	Dinas Sosial
Kebijakan menciptakan produk unggulan dan TTG di setiap kecamatan	Ragam komoditas pertanian, peternakan dan perkebunan yang menerapkan teknologi tepat guna;	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	50%	75%	85%	Dinas Pertanian
	Persentase peningkatan produksi dan produktivitas komoditas serta produk olahan pertanian,	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	50%	75%	85%	Dinas Pertanian
	ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta benih unggul, peternakan dan perkebunan yang digunakan	Program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	50%	75%	85%	Dinas Pertanian
	Persentase peternak yang mematuhi ketentuan	Program peningkatan produksi hasil peternakan	50%	75%	85%	Dinas Pertanian
	Persentase bibit yang bersertifikasi;	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	50%	75%	85%	Dinas Pertanian
	Persentase produk hewan dan hasil olahannya yang layak konsumsi	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	50%	75%	85%	Dinas Pertanian
	Ragam komoditas kelautan & perikanan yang menerapkan teknologi tepat guna;	Program pengembangan budidaya perikanan	50%	75%	85%	Kelautan dan Perikanan
	Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas serta produk olahan kelautan & perikanan;		50%	75%	85%	Kelautan dan Perikanan
	Ragam dan jumlah teknologi tepat guna kelautan dan perikanan yang digunakan.	Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan	50%	75%	85%	Kelautan dan Perikanan
		Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar				Kelautan dan Perikanan

52

3.

Kebijakan menciptakan pemasaran produk unggulan di Setiap kecamatan

Ragam komoditas kehutanan yang menerapkan teknologi tepat guna;	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Tidak Ada	Tidak Ada	100%	Kehutanan
Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas serta produk olahan kehutanan	Program pemanfaatan kawasan hutan industri	30%	30%	100%	Kehutanan
Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit kehutanan yang digunakan	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Tidak ada	Tidak ada	100%	kehutanan
Jumlah sumber mata air yang dikonservasi					Kehutanan
Ragam komoditas perindustrian dan perdagangan yang menerapkan teknologi tepat guna.	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi				Perindag
Peningkatan produksi komoditas perindustrian.	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial				Perindag
Ragam dan jumlah teknologi tepat guna perindustrian.	Program penataan struktur industri				Perindag
Persentase kecamatan yang memiliki posyantekdes;	Program pengembangan teknologi tepat guna perdesaan	1 Kec	1 Kec	100%	BPM Pemdes
Persentase masyarakat pedesaan yang memanfaatkan teknologi tepat guna.		100%	30%	30%	BPM Pemdes
Persentase kebutuhan pokok dan sarana produksi yang terjamin ketersediaannya dengan harga terjangkau	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri				Perindag
Jumlah pusat perdagangan representatif yang mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat sekitar Konawe Selatan					Perindag
Jumlah tempat pelelangan ikan, pasar ikan & kedai pesisir.	Program pengembangan sarana dan prasarana produksi penaknan				Kelautan dan Perikanan
Persentase kelancaran distribusi barang dan jasa di sentra-sentra produksi penaknan dan kawasan minapolitan	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan				Dinas Perhubungan
Persentase sentra produksi yang memiliki layanan transportasi umum yang tertib, aman dan lancar	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ				Dinas Perhubungan
Rasio ketersediaan jaringan trayek antar desa, kota dan provinsi;	Program peningkatan pelayanan angkutan				Dinas Perhubungan

4.

Kebijakan meningkatkan integrasi sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan dalam kawasan minapolitan

57

5. Mewujudkan Konawe Selatan Menjadi Tujuan Utama Investasi di Sulawesi Tenggara

Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan;	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan				Dinas Perhubungan
Persentase sentra produksi non perikanan yang memiliki sarana telekomunikasi dan informatika					Dinas Perhubungan
Tersedianya data/dokumen investasi dan realisasi investasi	Program Peningkatan investasi dan Realisasi investasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	Bappeda dan Penanaman Modal
Jumlah rapat koordinasi PM dan promosi produk-produk daerah	Program peningkatan promosi dan kerjasama dan kerjasama investasi	12 kali Koord dan 3 kali promosi daerah	12 kali Koord dan 3 kali promosi daerah	100,00%	Bappeda dan Penanaman Modal
	Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah				Bappeda dan Penanaman Modal
Persentase kecamatan yang menyediakan lahan investasi dengan kepastian hukum yang jelas	Program penataan administrasi pertanahan	22 Kec	5 Kec	23,00%	Bagian Pemerintahan Umum
luas lahan desa dengan sertifikasi tanah yang jelas.		Belum ada data	Belum ada data	0,00%	Bagian Pemerintahan Umum

Sales	PARAF
Isine	
3. Ien. Bala	
4. KADAG HUKUM	Sy
5.	
6.	

